

**EFEKTIVITAS REALISASI DAN SERAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN 2013-2015**

Nur Afnijaya Trisnawati

Mahasiwa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
nurafni@yahoo.com

Burhanuddin

Universitas Sriwijaya
burhanudin@unsri.ac.id

Ika Sasti Ferina

Universitas Sriwijaya
ikasastiferina@unsri.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research was to assess the realization effectiveness and uptake of Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) government at Ogan Komering Ilir in 2013-2015 has been implemented to achieve the desired goals yet. The method used in this research was descriptive quantitative by comparing the budget Laporan Realisasi Anggaran (LRA) from 2013-2015 at Ogan Komering Ilir district. The results of this study can be concluded that the realization of the Budget (APBD) has been performing well, but the average realization and uptake in Pendapatan Asli Daerah (PAD), other legitimate income and financing revenue area is not performing well or ineffective. This is because the available funds are not comparable to the program that will be conducted.

Keywords : APBD, Effectiveness, Government, LRA

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintahan termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara. Setelah era reformasi, terjadi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Inti dari reformasi tersebut adalah adanya pemberdayaan masing-masing elemen yang ada di daerah yaitu masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD. Dimensi reformasi sektor publik tidak hanya sekedar perubahan formasi institusi, tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel (Hudayah, 2012)

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*. Pentingnya efektivitas pengelolaan anggaran mulai dari penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan/pertanggungjawaban anggaran karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk reformasi anggaran dalam upaya memperbaiki proses penganggaran adalah penerapan anggaran berbasis kinerja. Melalui pendekatan penganggaran berbasis kinerja, Pemerintah dituntut untuk membuat standar kinerja bagi masing-masing SKPD pada setiap

anggaran kegiatan, sehingga jelas kegiatan apa yang akan dilakukan dan berapa biaya yang dibutuhkan dan apa hasil yang akan diperoleh (Tamasoleng, 2015)

Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* adalah ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya alam, artinya bahwa penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefit and minimizing cost*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Setiap tahun anggaran yang menjadi masalah rutin dalam anggaran adalah rendahnya daya serap anggaran.

Dalam nota keuangan dan RAPBN 2014 disebutkan bahwa daya serap anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam rata-rata hanya 87% dari penggunaan anggaran yang ditetapkan APBN setiap tahun. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan daerah BPKP mengatakan bahwa penyerapan dana tidak efektif tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). Di Indonesia rata-rata SILPA di Pemerintah Daerah pertahunnya melebihi Rp 50 Triliyun. Jumlah SILPA yang besar tersebut terjadi bukan karena semata mata efisiensi pengelolaan belanja daerah tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum efektif di dalamnya, salah satunya ada program/kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan (www.bpkp.go.id).

Fenomena yang terjadi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) yaitu bagi Pemerintah Daerah OKI dana perimbangan merupakan salah satu pos pendapatan yang sangat signifikan, hal ini nampak pada prakteknya bahwa transfer dari pusat merupakan sumber dana utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai keperluan operasional dan wajib dilaporkan dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer dari pemerintah pusat, maka stimulus yang ditimbulkan

berbeda dengan stimulus yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) merupakan salah satu kabupaten yang manjalankan otonomi daerah dalam mengelola APBD masih kurang baik. Hal ini disebabkan karena perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung hampir berbanding lurus atau 50%. Kondisi APBD Kabupaten OKI saat ini harus menjadi peringatan, jika hal ini terus dibiarkan pemerintah kedepan akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan, sebab dana yang tersedia tidak sebanding dengan program yang akan dilakukan (www.kaboki.go.id)

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana efektivitas realisasi dan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013-2015 ?

Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menilai efektivitas realisasi dan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013-2015

TINJAUAN PUSTAKA

Studi Kepustakaan Teori Stewardship

Menurut Halim (2012) akuntansi pemerintahan mempunyai tujuan yaitu pertanggungjawaban (*accountability and stewardship*) yang memiliki arti memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat yang berguna bagi pihak yang bertanggungjawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Pertanggungjawaban ini mengharuskan tiap orang atau badan yang mengelola keuangan

negara harus memberikan pertanggungjawaban atau perhitungan.

Melaksanakan hak dan kewajiban serta pelaksanaan tugas yang diberikan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang guna mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara seksama yang akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas negara. Oleh karena itulah, maka rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan negara perlu dibuat dan dituangkan dalam bentuk anggaran.

Efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran (OA) dengan output realisasi (OS), jika $OA > OS$ disebut efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar dari pada yang telah dianggarkan. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektif atau tidaknya pekerjaan tersebut dapat dilihat dari pencapaian atau hasil dari pekerjaan tersebut.

Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi dengan tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan Masruri (2014) yaitu:

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yaitu mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi;
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada

output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

Menurut Mahsun dalam Sumenge (2013) tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja, adapun rumusnya yaitu :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Keterangan :

Kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif;
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif;
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif;
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif;
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

Anggaran

Secara umum anggaran dapat diartikan sebagai suatu perkiraan atau estimasi atas penerimaan yang akan diterima dan pengeluaran yang akan dilakukan untuk melayani aktivitas yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang. Anggaran menurut Bastian dalam Silalahi (2012) dapat diinterpretasikan sebagai paket pertanyaan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode yang akan datang.

Fungsi dan Manfaat Anggaran

Secara umum, anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan

pengeluaran. Fungsi anggaran menurut Muchlis dan Bahtiar (2002) yaitu :

1. Sebagai pedoman pengelolaan negara, anggaran menggambarkan rencana dan pedoman pelaksanaan didalam penyelenggaraan negara dalam satu periode tertentu. Adanya anggaran tersebut pemerintah dapat mengukur kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan.
2. Sebagai alat prioritas, jumlah pendapatan sangat terbatas sementara jumlah belanja terus meningkat. Untuk itu pemerintah harus membuat skala prioritas berdasarkan tingkat kepentingan dari belanja negara tersebut dengan mendahulukan belanja sangat diperlukan dan mengurangi atau bahkan menghapuskan anggaran belanja yang tidak perlu, dengan kata lain para pengguna anggaran diharuskan berhemat dan efisien dalam hal belanja negara.
3. Sebagai alat negoisasi politik, adanya sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah merupakan sarana negoisasi politik dengan parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik dengan tujuan yang berbeda.
 - a. Sebagai alat perencanaan
Anggaran digunakan sebagai alat untuk menetapkan kehendak pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public welfare*) dengan jalan memanfaatkan sumber daya dan dana untuk mendukung kegiatan pembangunan jangka panjang dalam bentuk anggaran tahunan (*annual budget*).
 - b. Sebagai alat pengendalian
Anggaran digunakan sebagai alat pengendalian yang efektif, sehingga harus dilakukan secara melekat (*bult in control*) dalam tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.
 - c. Sebagai alat evaluasi
Kinerja setiap pelaksanaan dapat diukur dan dievaluasi secara periodik maupun insidental, yaitu :
 1. Apakah sudah sesuai dengan rencana kegiatan anggaran;

2. Apakah tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan;
3. Apakah sudah dilaksanakan secara efisien dan efektif berdasarkan pembandingan yang sejenis.

Karakteristik Anggaran

Karakteristik anggaran sektor publik yaitu :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan situasi non keuangan;
2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun;
3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih dari penyusunan anggaran;
5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat dirubah dalam kondisi tertentu. Karakteristik anggaran yang baik, yaitu :
 1. Berdasarkan program;
 2. Berdasarkan pusat pertanggungjawaban (pusat biaya, Pusat laba, dan pusat investasi);
 3. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Jenis Sistem Penganggaran

Sistem penganggaran menurut Bastian (2006), ada 5 (lima) yaitu :

1. Line Item Budgeting

Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan kepada dan dari mana itu berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan (pos-pos pengeluaran).

Karakteristik dari sistem penganggaran *line item* :

- a. Titik berat perhatian pada segi pelaksanaan dan pengawasan;
- b. Penekanan hanya pada segi administrasi.
- c. Penyusunan relatif mudah;
- d. Membantu dalam mengamankan komitmen di antara partisipasi sehingga dapat mengurangi konflik.

Kelemahannya :

- a. Perhatian terhadap laporan pelaksanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sangat kurang pertimbangan;
- b. Diabaikannya prestasi yang dicapai atas realisasi penerimaan dan pengeluaran yang dianggarkan;
- c. Para penyusun anggaran tidak memiliki alasan yang rasional dalam menetapkan target penerimaan dan pengeluaran.

2. Incremental Budgeting

Sistem ini menggunakan revisi anggaran pendapatan dan belanja tahun berjalan untuk menentukan anggaran tahun yang akan datang. Sekal suatu pos pengeluaran muncul didalam anggaran, maka selamanya pos tersebut ada pada anggaran periode berikutnya dengan perubahan/kenaikan yang didasarkan dari jumlah yang dianggarkan pada periode sebelumnya.

Titik perhatian adalah marginal atau selisih *incremental* antara anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya, bukan pada anggaran secara menyeluruh. Alasan diterapkannya sistem anggaran *incremental* ini adalah bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebelumnya merupakan kegiatan yang harus diteruskan pada tahun berikutnya.

Keunggulannya :

- a. Membantu mengatasi rumitnya proses penyusunan anggaran;
- b. Tidak memerlukan pengetahuan yang terlalu tinggi untuk memahami program-program baru;
- c. Dapat mengurangi konflik.

Kelemahannya sama dengan sistem anggaran *line item*.

3. *Planning Programing Budgeting System* (PPBS)

Planning programing budgeting system adalah suatu proses perencanaan, pembuatan program dan penganggaran yang terikat dalam suatu sistem sebagai satu kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah dan didalamnya terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasalahan yang mungkin timbul dalam pencapaian tujuan dan proses pertimbangan implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan yang akan datang.

Keunggulannya :

- a. Dapat menggambarkan tujuan organisasi dengan lebih nyata;
- b. Dapat menghindarkan adanya *overlapping* program dan pertentangan diantara program;
- c. Dapat memungkinkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dan efektif berdasarkan analisis manfaat dan biaya untuk mencapai tujuan.

Kelemahannya :

- a. Terlalu sukar diterapkan baik secara teknis maupun praktis sehingga sulit diterapkan khususnya di negara-negara berkembang;
- b. Merupakan proses yang multikompleks dan memerlukan banyak perhitungan dan analisa;
- c. Memerlukan kualitas pengelolaan yang sangat tinggi.

4. *Zero Based Budgeting*

Merupakan anggaran yang dibuat berdasarkan sesuatu yang sedang dilakukan dan tidak berdasarkan pada apa yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan dilihat sebagai sesuatu yang mandiri dan bukan merupakan kelanjutan dari apa yang sudah dilakukan.

Keunggulannya :

- a. Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen;

- b. Dana dapat dialokasikan dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif bagi pelaksanaan keputusan tersebut;
- c. Setiap program dan kegiatan selalu direview setiap tahun;
- d. Pengambilan keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang dianggap kritik dan mendesak.

Kelemahannya :

- a. Tidak mudah untuk diterapkan;
- b. Tidak semua kegiatan dapat disusun ranking keputusannya secara konsisten dari tahun ke tahun;
- c. Terlalu mahal dan memakan banyak waktu;
- d. Memerlukan skill khusus terutama dalam menganalisa dan menentukan prioritas/ranking;
- e. Memerlukan data yang lebih banyak dan diperlukan dukungan analisa yang cukup kuat;
- f. Sulit untuk memutuskan bahwa kegiatan yang satu benar-benar lebih penting dibandingkan kegiatan yang lainnya.

5. *Performance Budgeting System*

Cara penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja dan yang berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana yang untuk pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya/dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Keunggulannya :

- a. Memungkinkan adanya pendelegasian dalam wewenang pengambilan keputusan;
- b. Merangsang partisipasi dan motivasi unit-unit operasional melalui proses usulan dari bawah dan penilaian anggaran yang bersifat faktual;
- c. Dapat membantu meningkatkan fungsi perencanaan dan mempertajam keputusan pada semua tingkat;
- e. Memungkinkan alokasi dana secara optimal karena setiap kegiatan selalu dipertimbangkan dari segi efisiensi;
- f. Dapat menghindari pemborosan
Kelemahannya :
 - a. Tidak semua kegiatan dapat distandarisasikan;
 - b. Tidak semua hasil kerja dapat diukur secara kuantitatif;
 - c. Tidak ada kejelasan mengenai siapa pengambil keputusan dan siapa yang menanggung beban atas keputusan.

Keuntungan dan Kelemahan Anggaran

1. Keuntungan Anggaran

Sistem anggaran memiliki biaya dan memerlukan pengorbanan tetapi dibalik pengorbanan itu banyak keuntungan. Keuntungan anggaran antara lain adalah:

- a. Mempercepat dan mengefesienkan pencapaian tugas;
- b. Mengurangi tugas-tugas rutin operasional pimpinan sehingga ia lebih terfokus kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dari strategis;
- c. Meningkatkan daya kopetensi, motivasi, dan menimbulkan proses penilaian yang lebih objektif;
- d. Dapat menilai kemajuan kerja (*progress*) pencapaian tujuan;
- e. Dapat mengetahui lebih dini setiap penyimpangan dari tujuan;

- f. Dapat membedakan antara yang efisien dan yang tidak efisien;
- g. Mengurangi hal-hal yang bersifat kabur, ambivalen, atau ambigius;
- h. Dapat memantapkan pelaksanaan manajemen, pengawasan, akuntansi secara lebih baik;
- i. Dapat mengarahkan kegiatan kebidang yang lebih menguntungkan;
- j. Dapat menilai prestasi karyawan atau bagian yang lebih objektif.

2. Kelemahan Anggaran

Meskipun begitu banyak keuntungan yang diperoleh dengan menyusun anggaran, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang membatasi anggaran. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

- a. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil apabila dilaksanakan sungguh-sungguh;
- b. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu manajer dalam melaksanakan tugasnya, bukan menggantikannya;
- c. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan sebelumnya, karena itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes;
- d. Anggaran harus disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi (Prawironegoro, 2010).

Laporan Realisasi Anggaran

Menurut PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintahan pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. (Mardiasmo, 2002)

Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat untuk dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggungjawab Pemerintah Daerah karena APBD itu menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja (Mardiasmo, 2002).

Anggaran Belanja Daerah

Semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak terduga (Nafirin, 2000)

Kedudukan Belanja Daerah Dalam APBD

Kedudukan belanja dalam APBD yaitu:

1. Merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran serta berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas aktifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran yang dimaksud.
3. Penyusunan belanja diprioritaskan untuk menjunjung efektifitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan

kerja perangkat daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi tanggung jawab (Sumarni, 2006)

Anggaran Belanja Rutin

Anggaran yang disediakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang sifatnya lancar dan terus-menerus, yang dimaksudkan untuk menjaga kelancaran roda pemerintahan dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Dengan telah diberikannya kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, maka belanja rutin diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas rutin perangkat daerah. Perencanaan belanja rutin sedapat mungkin menerapkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada *output*). Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan analisa dan evaluasi hubungan antara kebutuhan dan hasil serta manfaat yang diperoleh (Nordawan, 2006)

Anggaran Belanja Pembangunan

Anggaran yang disediakan untuk membiayai proses perubahan yang merupakan perbaikan dan pembangunan menuju kemajuan yang ingin dicapai. Pengeluaran yang dianggarkan dalam pengeluaran pembangunan didasarkan atas alokasi sektoral (sektor/sub sektor) pajak dan retribusi daerah. Belanja pembangunan terdiri dari :

1. Belanja Publik
Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja publik merupakan belanja modal yang berupa investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.
2. Belanja Aparatur
Belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur menyebabkan terjadinya penambahan aktiva tetap dan aktiva tidak lancar lainnya. Belanja aparatur diperkirakan akan memberikan manfaat pada periode yang akan datang.
3. Pengeluaran transfer

Pengalihan uang dari pemerintah daerah dengan kriteria :

- a. Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti terjadi transaksi pembelian dan penjualan.
- b. Tidak mengharapkan dibayar kembali dimasa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman.
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi. Pengeluaran transfer ini terdiri atas angsuran pinjaman, dana bantuan dan dana cadangan (Mardiasmo, 2002)

Siklus Perencanaan Anggaran Daerah

Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan yang mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan anggaran daerah. Berdasarkan Undang-undang No.17 Tahun 2003 serta Undang-undang No.32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan rancangan APBD paling lambat pada pertengahan bulan juni tahun berjalan. Kebijakan umum APBD tersebut berpedoman pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pengeluaran RAPBD tahun anggaran berikutnya.
3. Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).
4. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada prioritas dan plafon

anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

5. RKA-SKPD tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan PERDA tentang APBD tahun berikutnya.
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan PERDA tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun berikutnya.
8. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan PER tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan (Bastian, 2006)

Value for Money

Tolak ukur dalam anggaran suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba (swasta) maupun organisasi nonprofit (sektor publik) adalah *value for money*, yang meliputi penilaian efisiensi, efektivitas dan ekonomis. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan anggaran belanja suatu organisasi sektor publik agar dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal.

Indikator *value for money* harus menggambarkan pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomis yang terbaik. Ini berarti unit biaya terendah tidak selalu menggambarkan *value for money* yang terbaik, karena dengan biaya termurah tidak selalu merupakan yang terbaik. Ekonomis yaitu mengurangi/meminimalkan penggunaan sumber daya dari sisi masukan (*input*) dalam suatu program kegiatan atau berkenaan dengan syarat dan kondisi dalam pengadaan sumber daya. Menghasilkan keluaran (*output*) maksimal dengan sumber daya yang ada atau dengan sumber daya minimal dapat menghasilkan keluaran (*output*) tertentu.

Efektif sering dikaitkan dengan kemanfaatan keluaran (*output*) yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau dihubungkan dengan tujuan akhir termasuk pengaruh/dampak yang lebih lanjut (*outcomes*). Efektivitas diartikan sebagai perbandingan masukan-keluaran dalam berbagai kegiatan, sampai dengan pencapaian tujuan yang ditetapkan, baik ditinjau dari kuantitas (*volume*) hasil kerja, kualitas kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Efektivitas adalah produk akhir suatu kegiatan (operasi) yang telah mencapai tujuannya, baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun target batas waktu.

Efisiensi adalah hubungan antara *input* dan *output* dimana barang dan jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa ekonomis membahas mengenai *input*, efektivitas membahas mengenai *output* dan efisiensi membahas mengenai *input* dan *output*.

Manfaat Implementasi Konsep *Value For Money*

Meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran. Meningkatkan mutu pelayanan publik, menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Dalam membuat sistem pengukuran kinerja, maka kegiatan yang dilakukan seperti memperkirakan kesiapan organisasi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja, merumuskan tujuan dari dilakukannya penerapan anggaran berbasis kinerja, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kebijakan atau keputusan yang diambil dalam penerapannya, mengembangkan rencana kerja yang semula telah disusun, memulai orientasi dan pelatihan, memilih bidang pelayanan yang akan diukur, merumuskan misi, tujuan dan sasaran,

mengenal pengukuran, membuat sistem pengumpulan data, analisa dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi.

Ada beberapa hal yang diperlukan dalam menentukan indikator kinerja seperti: memperhatikan sistem perencanaan dan pengendalian apakah sudah berjalan dengan baik, spesifikasi teknis dan standarisasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, kompetensi teknis dan profesionalisme dari SDM/karyaean pada instansi tersebut dan mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar, yaitu mekanisme ekonomi terkait dengan pemberian penghargaan dan hukuman (*reward & punishment*) yang bersifat finansial, sedangkan mekanisme pasar terkait dengan penggunaan sumber daya yang menjamin terpenuhinya *value for money*.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah suatu batasan untuk studi yang menjelaskan fokus studi agar tidak melebar dan menghindari analisis serta pembahasan yang terlalu luas. Dalam penelitian ini agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul yang ada, maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013-2015.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder, yaitu :

1) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari objek yang diteliti. Data primer di dapat dengan cara wawancara. Wawancara (*Interview*) yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan kepada responden. Peneliti melakukan wawancara kepada responden yang memiliki jabatan sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian

dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2) Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan penelitian dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) dan diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa uraian yang didapat dari bahan-bahan bacaan dan kepustakaan lain merupakan data pendukung data primer. Pengambilan data sekunder tidak boleh dilakukan secara sembarangan, oleh karena itu memerlukan metode tertentu. Cara-cara pengambilan data dapat dilakukan secara manual, online, kombinasi manual dan online. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Tahun 2013-2015.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang akan diolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1) Wawancara

Suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang dilakukan kepada responden. Peneliti melakukan wawancara kepada responden yang memiliki jabatan sebagai Wakil Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2) Kepustakaan

Mengumpulkan bahan penelitian dengan melakukan studi kepustakaan terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kuantitatif. Penulis mengumpulkan dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dan disertai dengan analisis yang telah di proses dengan dasar teori yang ada. Periode tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari tahun 2013-2015 dan data yang diambil berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun anggaran 2013 2015, berikut ini dilakukan analisis dan pembahasan mengenai efektivitas realisasi dan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2013-2015.

Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015

Efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio ini menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dibandingkan dengan APBD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Rasio efektivitas realisasi APBD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} : \frac{\text{Total Realisasi APBD}}{\text{Total Anggaran APBD}} \times 100\%$$

Sementara itu kriteria efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat dalam tabel 1. berikut :

Tabel 1
Kriteria Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kriteria	Efektivitas (%)
----------	-----------------

Sangat Efektif	100 keatas
Efektif	90-100
Cukup Efektif	80-90
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	Kurang dari 60

Sumber: Halim; 2012

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen, sehingga semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015

Berdasarkan efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013-2015, maka hasil perhitungan efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2013-2015 diuraikan dalam tabel 2 sebagai berikut

Tabel 2
Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015

No	Keterangan	Realisasi			Rata-rata	Kriteria			Kriteria rata-rata
		2013	2014	2015		2013	2014	2015	
	Pendapatan Daerah	92%	101%	95%	96%	Efektif	Sangat Efektif	Efektif	Efektif
1	Pendapatan Asli Daerah	92%	174%	75%	113%	Efektif	Sangat Efektif	Kurang Efektif	Sangat Efektif
2	Dana Perimbangan	101%	98%	97%	98%	Sangat Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
3	Lain-lain Pendapatan yang sah	55%	88%	98%	80%	Tidak Efektif	Cukup Efektif	Efektif	Cukup Efektif

Sumber : Data diolah dari lampiran I s.d III

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan yang terdapat pada tabel 2 terlihat bahwa pada tahun 2013 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai persentase 92% sehingga termasuk dalam kriteria efektif, walaupun penerimaan PAD yang terealisasi sebesar Rp 68.700.820.910,40 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 75.172.656.251,18.

Pada tahun 2014 realisasi pendapatan meningkat cukup tinggi dengan persentase 174% atau meningkat sebesar 82% dari tahun 2013, sehingga realisasi pendapatan tahun 2014 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan PAD yang terealisasi sebesar Rp 145.590.658.057,19 sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan sebesar Rp 83.571.552.557,61.

Realisasi pendapatan tahun 2015 hanya mencapai persentase sebesar 75% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan PAD yang terealisasi sebesar Rp 110.173.440.485,10 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 146.989.528.207,00.

Realisasi dana perimbangan tahun 2013 telah mencapai persentase sebesar 101% dan termasuk dalam kriteria sangat efektif.

Hal ini disebabkan karena penerimaan dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp 1.208.800.159.386,00 lebih besar dibandingkan dengan yang dianggarkan sebesar Rp 1.206.722.419.919,40.

Pada tahun 2014 persentase dana perimbangan hanya mencapai sebesar 98%, namun termasuk dalam kriteria efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp 1.279.107.615.047,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.298.588.621.364,00.

Persentase dana perimbangan pada tahun 2015 hanya tercapai sebesar 97%, namun termasuk dalam kriteria efektif. Penurunan ini disebabkan karena penerimaan dana perimbangan yang terealisasi sebesar Rp 1.255.126.807.195,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 1.296.307.857.343,00.

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2013 hanya mencapai persentase sebesar 55% dan termasuk dalam kriteria tidak efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp 132.908.025.009,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 240.391.462.320,16.

Pada tahun 2014 realisasi lain-lain pendapatan yang sah telah mencapai persentase sebesar 88% atau meningkat sebesar 33% dari tahun 2013, sehingga termasuk dalam kriteria cukup efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan lain-lain pendapatan yang sah telah terealisasi sebesar Rp 152.733.035.113,22 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 173.535.899.600,00.

Realisasi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2015 telah mencapai persentase sebesar 98% sehingga termasuk dalam kategori efektif, walaupun penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah telah

terrealisasi sebesar Rp 288.025.873.706,43 lebih kecil dari yang dianggarkan Rp 293.391.524.600,00.

**Analisis Efektivitas Serapan
 Belanja Daerah Kabupaten Ogan
 Komering Ilir Tahun 2013-2015**

Berdasarkan efektivitas serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2013-2015, maka hasil rekapitulasi perhitungan efektivitas serapan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 2013-2015 diuraikan dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Analisis Efektivitas Serapan Belanja Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015

No	Keterangan Belanja Daerah	Serapan			Rata-rata	Kriteria			Kriteria Rata-Rata 2015
		2013	2014	2015		2013	2014	2015	
		92%	96%	93%	93%	Efektif			Efektif
1	Belanja Langsung	93%	97%	90%	93%	Efektif			Efektif
2	Belanja Tidak Langsung	89%	95%	95%	93%	Cukup Efektif	Efektif	Efektif	Efektif
3	Penerimaan Pembiayaan Daerah	67%	70%	71%	69%	Kurang Efektif			Kurang Efektif
4	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	89%	100%	87%	92%	Cukup Efektif	Efektif	Cukup Efektif	Efektif

Sumber : Data diolah dari lampiran I s.d III

Berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan yang terdapat pada tabel 3 terlihat bahwa pada tahun 2013 serapan belanja langsung telah mencapai persentase sebesar 94% dan termasuk dalam kriteria efektif, walaupun pengeluaran belanja langsung yang terealisasi sebesar Rp 784.345.151.581,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 836.115.369.809,00.

Persentase belanja langsung yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 97% dan termasuk dalam kriteria efektif, walaupun pengeluaran belanja langsung yang terealisasi sebesar Rp 779.145.627.210,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 803.063.968.259,00.

Pada tahun 2015 serapan belanja langsung telah mencapai persentase sebesar 91%, sehingga termasuk dalam kriteria efektif, walaupun pengeluaran belanja langsung yang terealisasi sebesar Rp 886.051.839.378,90 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 974.919.844.086,00.

Serapan belanja tidak langsung pada tahun 2013 telah mencapai persentase sebesar 89% dan termasuk dalam kriteria cukup efektif, walaupun pengeluaran belanja tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp 639.724.488.358,37 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 715.940.576.774,00.

Persentase belanja tidak langsung tahun 2014 telah mencapai persentase sebesar 95% dan termasuk dalam kriteria efektif, walaupun pengeluaran belanja tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp 712.425.667.391,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 742.568.383.403,00.

Pada tahun 2015 serapan belanja tidak langsung telah mencapai persentase sebesar 95% sehingga termasuk dalam kriteria efektif, walaupun pengeluaran belanja tidak langsung yang terealisasi sebesar Rp

859.258.682.386,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 907.084.359.643,00.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2013 hanya mencapai persentase sebesar 66% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan pembiayaan daerah yang terealisasi sebesar Rp 27.569.752.998,00 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 41.019.408.092,21.

Pada tahun 2014 persentase penerimaan pembiayaan daerah hanya mencapai sebesar 70% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan pembiayaan daerah yang terealisasi sebesar Rp 13.234.329.141,62 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 18.995.578.944,39.

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2015 hanya mencapai persentase sebesar 71% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif. Hal ini disebabkan karena penerimaan pembiayaan daerah yang terealisasi sebesar Rp 110.561.732.750,74 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 156.256.618.323,68.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2013 termasuk dalam kriteria cukup efektif, dengan persentase sebesar 89%, walaupun pengeluaran pembiayaan daerah yang terealisasi sebesar Rp 9.541.324.745,54 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 10.941.324.745,54.

Pada tahun 2014 pengeluaran pembiayaan daerah telah mencapai persentase sebesar 100%, sehingga termasuk dalam kriteria efektif. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pembiayaan daerah yang terealisasi sebanding dengan yang dianggarkan sebesar Rp 29.059.300.80400.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2015 termasuk dalam kriteria cukup efektif, dengan persentase sebesar 87%. Hal ini disebabkan karena pengeluaran pembiayaan daerah yang

teralisasi sebesar Rp 9.541.324.745,54 lebih kecil dari yang dianggarkan sebesar Rp 10.941.324.745,54.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terkait Efektivitas Realisasi dan Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2015, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rata-rata realisasi pendapatan daerah dari tahun 2013-2015 telah mencapai persentase sebesar 96% dan termasuk dalam kriteria efektif. Kondisi ini tercermin dari :
 - 1) Rata-rata realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan persentase yang dicapai sebesar 92% dan termasuk dalam kriteria efektif.
 - 2) Rata-rata realisasi dana perimbangan dengan persentase yang dicapai sebesar 98% sehingga termasuk dalam kriteria efektif.
 - 3) Rata-rata realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan persentase yang dicapai sebesar 80% dan termasuk dalam kriteria cukup efektif.
2. Rata-rata serapan belanja daerah dari tahun 2013-2015 telah mencapai persentase sebesar 93%, sehingga termasuk dalam kriteria efektif. Kondisi ini tercermin dari :
 - 1) Rata-rata serapan belanja langsung dan tidak langsung telah mencapai persentase masing-masing sebesar 93%, sehingga termasuk dalam kriteria efektif.
 - 2) Rata-rata serapan penerimaan pembiayaan daerah hanya

mencapai persentase sebesar 69% dan termasuk dalam kriteria kurang efektif.

- 3) Rata-rata serapan pengeluaran pembiayaan daerah telah mencapai persentase sebesar 92% dan termasuk dalam kriteria efektif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas diberikan beberapa saran untuk memperbaiki kelemahan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas pembangunan daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ilir hendaknya menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang dapat dikelola oleh daerah sehingga kebijakan pembangunan tersebut dapat dicapai dengan baik.
2. Tingkat efektivitas realisasi dan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah efektif perlu dipertahankan, karena ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang baik dalam merealisasikan Pendapatan yang telah direncanakan.
3. Tingkat efektivitas realisasi dan serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Kabupaten Ogan Komering Ilir yang kurang efektif dan tidak efektif harus lebih ditingkatkan yaitu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), lain-lain pendapatan yang sah dan penerimaan pembiayaan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. & Ermataty, H. (2012). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Pusat (Studi pada Politeknik Negeri Padang). *Jurnal Akuntansi dan Management*, Vol. 7 No. 2 hal 24-35

- Arfan, M. & Edi, F. (2009), Pengaruh Masa Kerja, Jabatan, dan Jenjang Pendidikan Terhadap Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah Tentang Prinsip-prinsip *Good Governance* di Pemerintah Kota Banda Aceh, *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 hal 1-14
- Asrida, 2012, Pengaruh Penerapan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Penyusunan Anggaran Pada Pemerintah Kabupaten Bireuen, *Jurnal Kebangsaan*, Vol. 01 No. 01 hal 29-40
- Azlim, 2012, Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1 No. 1 hal 1-14
- Azlina, N. & Ira, A. (2014), Pengaruh *Good Governance* dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12 No. 2 hal 32-42
- Bakri, 2015, Pengaruh Efektivitas Pengendalian Anggaran Terhadap Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Boalemo, *Jurnal IAI Gorontalo*, Vol. 11 No. 1 hal 167-184
- Batubara, A. H. (2006). Konsep *Good Governance* dalam Konsep Otonomi Daerah, *Jurnal Analisis Akuntansi dan Kebijakan*, Vol. 3 No. 1 hal 1-6
- Direktorat Jenderal Anggaran tahun 2015. www.anggaran.depkeu.go.id
- Diakses pada tanggal 21 November 2015
- Halim, Abdul. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.
- Haruman. 2010. Penyusunan Anggaran Perusahaan. Edisi Kedua. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Hudayah, S. (2012), Pengetahuan Anggaran, Efektivitas Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Hubungannya Dengan Kepuasan Atas Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Empiris di Kota Samarinda), *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 8 No. 1 hal 50-74
- Indrawati, N. (2010), Penyusunan Anggaran Dalam Era *New Public Management* Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 10 No. 02 hal 176-193
- Jalaluddin & Dafi, B. (2009), Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, dan Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 hal 44-53
- Mardiasmo, 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Liberty
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta
- Masruri, 2014, Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), *Journal of governance and Public Policy*, Vol. 1 No. 1 April 2014, hal 53-76
- Nafirin, 2000. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Erlangga

- Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan *Good Governance*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* Vol. 1 No. 3 hal 19-29
- Nordiawan, 2006. Akuntansi Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat
- Nurhalimah, (2013), Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh, *Jurnal Akuntansi*, Vol. 02 No. 01 hal 27-36
- Prawironegoro.2010. Penganggaran Perusahaan. Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Rahman, F. A. (2009), Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 15 No. 01 hal 85-101
- Sabrina, 2009. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating
- Sari, E. N. (2012), Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap *Good Governance* (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan), *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 12 No. 2 hal 25-54
- Silalahi, S. P. (2012). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintah di Kota Dumai). *Jurnal Ekonomi*, Vol. 20 No. 3 hal 1-20
- Sulistio, E. B. (2010). Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi pada Pemerintah Kabupaten Way Kanan), *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 01 No. 01 hal 1-11
- Sumarni, 2006. Metodologi penelitian bisnis. Yogyakarta: CV Andi OOFSET
- Sumenge, A. S. (2013), Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Mibahasa Selatan, *Jurnal EMBA*, Vol. 1 No. 3 hal 74-81
- Supardji & Yulian, S. (2009), Pengaruh Efektivitas Penerapan Anggaran Terhadap Penilaian Kinerja Pusat Laba, *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, Vol. 9 No. 2 hal 97-103
- Tamasoleng, A. (2015), Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1 hal 97-110
- Taufik, T. & Dian, K. (2013), Pengaruh Pemahaman Prinsip Prinsip *Good Governance*, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Sektor Publik. *Pekbis Jurnal*, Vol. 5 No. 1 hal 51-63